

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab tinjauan literatur ini, penulis mengumpulkan dan memanfaatkan berbagai sumber penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, dengan tujuan sebagai kerangka dan pembanding bagi penelitian yang akan penulis teliti. Tinjauan literatur dapat berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel, media *online*, atau berita resmi. Selain itu, tinjauan literatur berfungsi untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian terdahulu dari segi validitas sumber, metodologi penelitian yang digunakan, dan kesenjangan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan beberapa studi perbandingan mengenai subjek penelitian ini, antara lain:

Literatur pertama yaitu pada tahun 2024 yang berjudul "*Illegal fishing Threatens The Sustainability of Future Tuna Commodities in Indonesia*" yang ditulis oleh Alexander M.A. Khan, Ming-guo Jiang, Xiao-qiang Yang, Izza Apriliani, Noir Purba, Budy Wiryawan, Am Azbas Taurusman, dan Buntora Pasaribu. Dalam tulisan ini meneliti tantangan yang signifikan dalam perkembangan sektor perikanan tuna di Indonesia, terutama karena praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF) yang menyebabkan penurunan stok tuna. Dalam penelitian ini penulis meninjau perkembangan praktik IUUF, dan membahas peluang dalam mengatur kebijakan perikanan tuna yang berkelanjutan di Indonesia. Jurnal ini menggunakan data kuantitatif yang dikumpulkan dari lembaga pemerintah, dilengkapi dengan data dari tinjauan literatur dan analisis laporan media dan publikasi terpilih yang membahas

praktik penangkapan ikan tuna IUUF di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia meliputi kejahatan terhadap hak asasi manusia (kerja paksa dan perdagangan manusia), korupsi (moneter), penyelundupan tuna, kesalahan dokumen (salah lapor dan hasil tangkapan yang tidak tercatat); dan praktik penangkapan meliputi trans-pengapalan hasil tangkapan oleh armada penangkapan ikan skala kecil dan industri. Penelitian ini merekomendasikan pengimplementasian *Indonesian Ocean Policy* (IOP) untuk memerangi penangkapan ikan IUUF dapat memberikan dampak transformatif terhadap pola penangkapan ikan IUUF di Indonesia.

Literatur kedua yang berjudul “*Illegal Fishing Ikan Tongkol dan Tuna di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*” yang ditulis oleh Abid Muhtarom, Nurul Badriyah, dan Uzlifatul Isnawati pada tahun 2017. Jurnal ini meneliti mengenai pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia berdampak langsung pada anjloknya ekspor perikanan Thailand yang berimbas kepada Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan purposive sampling, dimana sumber data primer dan sekunder diperoleh dari sumber internet serta lokasi penelitian di perairan seluruh Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa selain industri perikanan Thailand mengalami penurunan, penyebab utamanya adalah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mulai memberantas kapal penangkap ikan ilegal dan moratorium bekas kapal asing di kuartal IV 2014. Kemudian, Menteri Susi juga ingin mendorong isu IUUF sebagai permasalahan global dan memiliki sifat kejahatan transnasional.

Literatur ketiga yang ditulis oleh Solène Guggisberg yang berjudul “*The Roles of Nongovernmental Actors in Improving Compliance with Fisheries Regulations*” pada tahun 2019. Jurnal ini meneliti mengenai peran penting nonpemerintah dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan perikanan internasional. Penulis menjelaskan bahwa Peran ini terdiri dari, di satu sisi, pemantauan, investigasi, dan pelaporan kejadian penangkapan ikan IUUF, dan tindakan langsung di ZEE negara pesisir dan laut lepas. Temuan menunjukkan bahwa Keterlibatan NGO dalam tata kelola perikanan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi kasus-kasus yang berpotensi menjadi IUUF, tetapi juga juga meningkatkan kesadaran akan isu-isu struktural yang dihadapi dan kurangnya inisiatif pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam jurnal ini penulis memberi saran dimana negara dapat memperbaiki situasi saat ini dengan memberikan posisi yang lebih formal kepada aktor nonpemerintah dalam proses kepatuhan perikanan. Kemudian, berfokus pada perubahan hukum atau manajemen struktural, dalam jangka menengah dan panjang merupakan upaya yang lebih efisien serta menjanjikan daripada memantau setiap kapal. Oleh karena itu, Negara dan NGO harus bekerjasama untuk meningkatkan tata kelola perikanan, serta memastikan penghormatan yang berkelanjutan terhadap supremasi hukum.

Literatur keempat yaitu “*NGO and Global Voluntary Standards in Sustainable Seafood: The Case of Aquaculture Stewardship Council (ASC) in Indonesia*” ditulis pada tahun 2023 oleh Moch Faisal Karim dan Jassinda Almira. Jurnal ini membahas bagaimana *World Wildlife Fund* (WWF) membantu mengimplementasikan standar ekolabel *Aquaculture Stewardship Council* (ASC) di Indonesia. Dengan menggunakan teori transisi sebagai kerangka kerja, jurnal ini

menemukan bahwa WWF telah memainkan peran penting dalam tiga bidang: (1) harmonisasi peraturan nasional dengan prinsip-prinsip ASC, (2) pembentukan program kampanye untuk mengadvokasi masyarakat dalam perilaku konsumsi makanan laut yang berkelanjutan, dan (3) membentuk lembaga khusus untuk membantu pelaku industri perikanan dalam memperoleh sertifikat ASC. Kemudian penulis menyoroti pentingnya kolaborasi yang kuat antara pelaku bisnis, negara, dan *Non-Governmental Organization* (NGO) untuk mengimplementasikan standar sukarela secara global.

Literatur kelima yaitu pada tahun 2021 yang berjudul “*Evaluating The Theoretical and Practical Linkages Between Ecosystem-Based Fisheries Management and Fisheries Co-Management*” yang ditulis oleh Marina Cucuzza, Joshua S. Stoll, Heather M. Leslie. Jurnal ini menganalisis *Ecosystem-Based Fisheries Management* (EBFM) yang mengalami banyak kemajuan namun perhatian masih terbatas untuk menilai hubungan teoretis dan praktis antara EBFM dan pengelolaan bersama perikanan. Jurnal ini menggunakan tinjauan literatur berbasis analisis konten untuk mengevaluasi sejauh mana konsep-konsep ini terkait dan kesamaan di antara pendorong, atribut, dan hasil yang diinginkan. Penulis menggambarkan pendorong, atribut, dan hasil yang diinginkan yang biasanya digunakan untuk mengkarakterisasi konsep manajemen EBFM. Studi kasus menunjukkan bahwa hasil pengelolaan yang diperkaya dapat dicapai dengan peningkatan partisipasi dari pemanen sumber daya. Nelayan lokal yang terlibat dalam proses pengelolaan menghasilkan peningkatan partisipasi, komunikasi, tenaga kerja, kepercayaan, dan informasi bersama antara komunitas nelayan dan pengambil keputusan. Di tingkat federal, proses integrasi EBFM mendorong

koordinasi dengan Dewan Regional dan menyajikan berbagai opsi bagi dewan untuk mengoperasionalkan EBFM pada skala regional.

Tinjauan keenam ini diteliti oleh Salmarika dkk. (2022) mengenai tren produksi dan proyeksi masa depan spesies tuna, cakalang, dan tongkol (TCT) di Pelabuhan Perikanan Sibolga, Sumatera Utara, Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya spesies TCT secara ekonomi, yang menyumbang 63% dari total pendaratan ikan di pelabuhan. Dengan menggunakan prakiraan dekomposisi multiplikatif, penelitian ini memproyeksikan penurunan produksi tuna sirip kuning dan kawakawa, sementara memprediksi peningkatan untuk cakalang dan tuna tongkol hingga tahun 2025. Penelitian ini mengidentifikasi pola musiman, dengan Oktober-November diproyeksikan sebagai musim puncak untuk cakalang, sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang kondisi oseanografi (Hariati dkk., 2010; Zainuddin dkk., 2016), dan April untuk tuna cakalang (Limbong, 2017). Studi ini memberikan wawasan yang berharga untuk pengelolaan perikanan dan perencanaan industri, berkontribusi pada literatur yang terus bertambah tentang pengelolaan perikanan tuna tropis skala kecil di Indonesia. Namun, para penulis mencatat bahwa proyeksi mengasumsikan kondisi armada dan pendaratan saat ini tetap stabil, sehingga penelitian di masa depan dengan memasukkan variabel tambahan seperti faktor lingkungan dapat meningkatkan akurasi proyeksi.

Dari kajian literatur diatas, terdapat pembahasan mengenai urgensi serta dampak masalah *overfishing* serta peran penting aktor non negara dalam mengatasi masalah ini. Didalam penelitian-penelitian tersebut membahas isu serupa dengan tema isu yang akan diteliti yaitu isu *overfishing* di laut Indonesia. Namun, didalam penelitian-penelitian diatas hanya menjelaskan mengenai peran NGO serta dampak

dari masalah ini yang merugikan masyarakat Indonesia saja. Adapun penjelasan spesifik mengenai peran NGO secara spesifik yakni WWF namun berfokus pada isu yang terdapat di Indonesia. Dalam literatur yang telah ditinjau, tidak dijelaskan bagaimana peran WWF dalam mengatasi permasalahan *overfishing* yang dihadapi Indonesia dalam sektor perikanan yang sedang berkembang.

2.2 Kerangka Teoritis

A. *Non-Governmental Organization* (NGO)

Non-Governmental Organization (NGO) adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melayani kepentingan sosial dengan fokus advokasi dan/atau usaha operasional padahal sosial, politik dan ekonomi, kesetaraan, pendidikan, kesehatan, penyelamatan lingkungan dan hak asasi manusia (Teegen et al., 2004). Adapun pengertian lain mengenai NGO yang diberikan oleh Willetts (2002) mendefinisikan NGO sebagai "perkumpulan sukarela yang independen yang terdiri dari orang-orang yang bekerjasama secara berkesinambungan, untuk suatu tujuan yang sama, bukan untuk memperoleh jabatan di pemerintahan, mencari keuntungan, atau melakukan kegiatan ilegal." Tesis ini mengeksplorasi pentingnya dua karakteristik utama yang diuraikan Willetts: (1) kemandirian dari kontrol pemerintah dan afiliasi politik, (2) misi non-profit, dan (3) non-kekerasan (Peter Willetts, 2011).

Menurut David dan Nazneen (2001) bahwa banyak organisasi NGO yang terlibat pada tiga peran sekaligus atau tidak hanya berfokus pada satu peran (peran tunggal). Mereka mengatakan bahwa NGO memiliki tiga peran utama dari kegiatan yang dilakukan. Tiga peran tersebut yaitu pelaksana (*implementers*) memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa yang penting, menangani isu-isu seperti perawatan kesehatan, keuangan, pertanian, perlindungan lingkungan, dan

hak asasi manusia. Mereka dapat mengimplementasikan program secara mandiri atau berkolaborasi dengan pemerintah atau donor; katalis (*catalysts*) menginspirasi, memfasilitasi, dan mempromosikan norma dan nilai baru, mendorong perubahan positif. Mereka bekerja dengan individu, komunitas, pemerintah, sektor swasta, dan donor untuk mengatasi masalah-masalah sosial; dan mitra (*partners*) NGO berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, berbagi risiko dan tanggung jawab. Mereka semakin banyak bermitra dengan pemerintah, donor, dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program dan proyek yang lebih luas (Lewis et al., 2020).

Sedangkan menurut pandangan Werner J. Feld, Robert S. Jordan, dan Leon Hurwitz, ada tiga kategori utama tujuan yang diusung oleh inisiatif NGO, yaitu:

1. Mendorong dan memajukan kepentingan mereka sendiri di tingkat internasional dan nasional;
2. Melakukan promosi, modifikasi, atau penentangan terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh PBB, lembaga-lembaga dan afiliasi-afiliasinya, terutama NGO regional;
3. Memberikan dukungan, melakukan modifikasi, atau menentang tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional (Feld et al., 1984).

Peran sebagai pelaksana atau *implementers* didefinisikan sebagai upaya dalam mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa, baik sebagai bagian dari proyek atau program NGO itu sendiri maupun proyek atau program pemerintah atau lembaga donor. Peran ini mencakup banyak tugas yang paling dikenal yang dilakukan oleh NGO dan mencakup program dan proyek yang dibuat

NGO untuk menyediakan layanan bagi masyarakat (seperti layanan kesehatan, kredit, penyuluhan pertanian, nasihat hukum, atau bantuan darurat) serta pertumbuhan 'kontrak', di mana NGO dilibatkan oleh pemerintah atau lembaga donor untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan imbalan pembayaran (Lewis, 2001).

Peran NGO sebagai katalisator atau *catalysts* didefinisikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi, memfasilitasi atau berkontribusi terhadap perubahan pembangunan di antara para pelaku lain di tingkat organisasi atau individu. Hal ini mencakup pengorganisasian akar rumput dan pembentukan kelompok, pendekatan pemberdayaan terhadap pembangunan, lobi dan advokasi, inovasi di mana NGO berusaha mempengaruhi proses kebijakan yang lebih luas, dan pekerjaan kampanye umum (Lewis, 2001).

Peran NGO sebagai mitra atau *partnership* mencakup kecenderungan yang berkembang di kalangan NGO untuk bekerja sama dengan pemerintah, donor dan sektor swasta dalam kegiatan bersama, serta hubungan yang kompleks yang muncul di antara NGO, seperti 'pengembangan kapasitas'. Retorika baru tentang kemitraan kini menjadi tantangan bagi NGO untuk membangun hubungan kemitraan yang bermakna dan menghindari ketergantungan, kooptasi, dan pengalihan tujuan (Lewis, 2001).

Dalam studi ini, peran WWF sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) terutama tercermin dalam tiga fungsi utamanya, yang diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan advokasi. Salah satu fungsi kunci adalah aktivisme. Kekuatan NGO dalam hal ini terletak pada kemampuannya untuk memulai inisiatif dan

menetapkan agenda. Masyarakat umumnya memiliki pandangan positif terhadap aktivitas NGO seperti WWF dan Amnesty International. Akibatnya, aksi protes yang dilancarkan oleh NGO dapat menjadi ancaman signifikan bagi pihak-pihak lain yang terlibat (Boström & Hallström, 2010).

B. *Overfishing*

Penangkapan ikan yang berlebihan atau yang biasa disebut *overfishing* merupakan masalah muncul ketika kapal menangkap ikan lebih cepat daripada jumlah ikan yang dapat dipulihkan. Meskipun penangkapan ikan itu sendiri tidak secara langsung berbahaya bagi lautan, namun masalah ini menjadi penyebab utama penurunan populasi satwa laut (WWF, n.d). Penangkapan ikan yang berlebihan meningkatkan kerentanan ekosistem laut dan dapat berkontribusi pada penurunan spesies laut lainnya, termasuk burung dan mamalia (UNEP, 2004).

Definisi awal dari “*overfishing*” sebagian besar didasarkan pada pengamatan dan berfokus pada dampak jangka pendek dan hal ini berkaitan dengan istilah “*sustainable*” atau berkelanjutan yang kerap diasumsikan sebagai jawaban dari eksploitasi penangkapan ikan berlebihan ini. Penggunaan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai mengambil ikan dalam jumlah yang lebih sedikit daripada surplus reproduksi alami populasi tersebut. Sebaliknya, setiap aktivitas penangkapan ikan yang mengurangi ukuran populasi dianggap sebagai eksploitasi berlebihan. Model-model awal dalam perikanan bertujuan untuk memahami dinamika populasi agar dapat mengidentifikasi kapan penangkapan ikan berlebih terjadi. Misalnya, Russell (1931) menjelaskan bahwa populasi ikan berubah karena adanya rekrutan baru, pertumbuhan individu, dan kerugian akibat penangkapan ikan serta penyebab alami. Konsep ini menggemakan gagasan sebelumnya oleh

Baranov (1926) bahwa hasil yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara panen dan regenerasi alami, sambil mempertimbangkan penurunan populasi alami. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil tahunan maksimum tanpa menghabiskan stok ikan, yang diperkirakan terjadi pada titik pertumbuhan maksimum, meskipun sulit untuk ditentukan karena fluktuasi alami dalam populasi (Goethel et al, 2012).

Seperti halnya istilah “*sustainable*”, definisi “*overexploitation*” telah berevolusi dari waktu ke waktu, menjadi lebih kompleks dan mencakup perspektif yang lebih luas (Smith, 1994). Akibatnya, “*Overexploitation*” telah menjadi istilah yang agak kabur yang sering dikaitkan dengan keberlanjutan, tetapi keduanya tidak selalu berhubungan secara langsung (Beverton dan Holt, 1957). Heino dan Enburg (2008) berpendapat bahwa pemahaman modern tentang “*overexploitation*” melibatkan eksploitasi sumber daya secara lebih intens daripada batas yang disepakati. Mereka menekankan bahwa bukan peran ilmu pengetahuan untuk menentukan batas-batas ini, meskipun para ilmuwan dapat memberikan panduan mengenai pilihan-pilihan yang potensial. Meskipun eksploitasi berlebihan dan ketidakberlanjutan dapat didefinisikan dengan cara yang sama, kedua istilah ini tidak selalu berkaitan erat. Meskipun istilah-istilah modern masih kerap diperdebatkan, namun gagasan inti dari sejarah masih penting dalam definisi saat ini. Melihat penyalahgunaan sumber daya di masa lalu akan membantu kita memahami arti konsep eksploitasi berlebihan. Menyadari bahwa sumber daya dapat habis atau terkuras merupakan hal yang sangat penting dalam memotivasi pergeseran menuju praktik-praktik yang berkelanjutan (Goethel et al, 2012).

Penangkapan ikan yang berlebihan secara sistemik diperparah oleh penangkapan dan perdagangan ilegal. Faktanya, beberapa dampak terburuk

terhadap lautan disebabkan oleh penangkapan ikan ilegal yang merajalela, yang diperkirakan mencapai 30% dari hasil tangkapan atau lebih untuk spesies bernilai tinggi. Hasil tangkapan ilegal ini bergerak melalui rantai pasokan yang tidak jelas karena kurangnya sistem untuk melacak ikan dari tangkapan hingga ke tangan konsumen-sesuatu yang disebut ketertelusuran-dan kontrol impor di sebagian besar sektor ini (WWF, n.d).

Beberapa faktor yang menyebabkan turunnya jumlah spesies laut diantaranya:

1. Teknologi

Berkurangnya jumlah ikan di laut dan masalah penangkapan ikan berlebihan secara signifikan didorong oleh teknologi penangkapan ikan yang canggih saat ini. Kapal-kapal kini dapat berada di laut selama berbulan-bulan, dan sering kali menyiapkan hasil tangkapan untuk dipasarkan di atas kapal. Pukat harimau yang merusak menyeret jaring logam yang berat di dasar laut untuk memaksimalkan tangkapan yang hidup di dasar laut. Alat navigasi seperti GPS dan radar memungkinkan kapal menemukan dan memindahkan lokasi penangkapan ikan terbaik secara tepat. Selain itu, teknologi pengangkutan dan pengawetan makanan modern memungkinkan ikan segar tersedia sepanjang tahun dan secara global, mendobrak batasan konsumsi tradisional yang terbatas pada daerah pesisir.

2. Kapasitas Berlebih

Kelebihan kapasitas adalah keberadaan terlalu banyak kapal dalam jumlah yang terus bertambah. Stok ikan secara umum dianggap sebagai milik bersama, terbuka untuk dieksploitasi oleh siapa pun yang memiliki

kapal dan peralatan selama mereka digunakan 200 Mil di luar Zona Ekonomi Eksklusif dari suatu negara. Semakin banyak nelayan yang masuk ke dalam sistem ini, semakin besar upaya yang dibutuhkan untuk menangkap pasokan yang semakin menipis dan pendapatan pun menurun. Pada akhirnya, stok ikan bisa sangat menipis. Kapasitas penangkapan ikan yang berlebihan menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan dan oleh karena itu menyebabkan degradasi sumber daya perikanan. Praktik-praktik yang tidak berkelanjutan seperti itu, yang menciptakan konflik antara keuntungan jangka pendek dan jangka panjang, menimbulkan dampak serius pada keanekaragaman hayati dan mengurangi potensi produksi pangan yang penting bagi sejumlah negara berkembang.

3. *Bycatch*

Tangkapan sampingan atau *bycatch* mengacu pada bagian dari kehidupan laut yang ditangkap yang tidak menjadi target, mencakup spesies bernilai rendah, tetapi juga sejumlah besar ikan muda atau ikan berukuran kecil dari spesies komersial yang berharga. Kerap kali ikan tangkapan sampingan dipelihara untuk dijual di pasar atau dibuang dalam keadaan mati, karena spesiesnya salah, ukurannya tidak sesuai, kualitasnya lebih rendah, atau melebihi kuota operasi penangkapan ikan. Dampak potensial dari tangkapan sampingan tidak hanya pada stok ikan komersial, tetapi juga pada seluruh keanekaragaman spesies dalam ekosistem laut dan komponen rantai makanan yang penting. *Bycatch* umumnya merupakan hasil dari jaring pukat harimau dengan menangkap semua yang dilewati dengan tingkat tangkapan sampingan yang sangat tinggi (UNEP, 2004).

2.3 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah keyakinan penulis dalam merancang studi yang sedang dikembangkan. Berdasarkan data yang telah diperoleh, penulis berasumsi bahwa pelaksanaan program *Seafood Savers* oleh *World Wildlife Fund* (WWF) dalam mengatasi isu *overfishing* ikan tuna akan berhasil direalisasikan untuk mengurangi dampak kerusakan ekosistem laut yakni hilangnya tuna di Indonesia sebagai komoditas yang berharga. Dengan adanya WWF melalui program *Seafood Savers* yang berperan sebagai pelaksana, katalis, dan mitra yang mengacu kepada standar sertifikasi ekolabel internasional kepada perusahaan, pemerintah, dan para pemegang kepentingan. Hal ini akan memberikan pengetahuan kepada seluruh pihak terkait akan pentingnya pelaksanaan perikanan berkelanjutan untuk menanggulangi *overfishing* ikan tuna di Indonesia.

2.4 Kerangka Analisis

